



Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L k J I P

ADDRESS:

Jalan Jenderal Ahmad
Yani Kav. 58 By Pass
Cempaka Putih Timur -
Jakarta Pusat 13011

CONTACT:

Phone : 021-29079177
Email : informasi.bawas@
mahkamahagung.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai 'Badan Pengawasan') tahun 2022 telah terselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu setahun, dengan maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kehadiran laporan ini juga ditujukan sebagai gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan, sehingga dapat memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun mendatang.

LKjIP ini dapat tersusun atas kerja sama yang baik dengan rekan-rekan kerja di lingkungan Badan Pengawasan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam usahanya memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas implementasi pengawasan ke depannya.

Jakarta, 13 Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO ✓

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal telah melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yaitu berupa seluruh proses kegiatan yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai. Keyakinan tersebut menyiratkan bahwa tiap-tiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mekanisme, dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal, serta berupaya terus-menerus dalam meningkatkan mutu dan hasil pengawasan serta pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan, serta adanya akses kemudahan Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian laporan/pengaduan. Dalam usaha menjaga keberlangsungan dan efektivitas tugas tersebut, Badan Pengawasan ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Badan Pengawasan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan Indonesia.

Badan Pengawasan wajib mempertanggungjawabkan, dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan visi dan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Tahun 2020 – 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Pengawasan dilakukan dengan beberapa metodologi, mulai dari membandingkan antara ‘rencana kinerja’ yang diinginkan dengan ‘realisasi kinerja’ yang dicapai per tahun yang bersangkutan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja ‘tahun ini’ dengan ‘tahun lalu,’ hingga analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja dalam suatu masa. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang pelaksanaan kegiatan Badan Pengawasan apa saja yang telah maupun belum sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan visi dan misi Badan Pengawasan.

Secara garis besar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Tahun 2022 ini menyajikan pengukuran, evaluasi, dan analisis pencapaian sebagai berikut.

1. Dari 16 indikator kinerja per tahun 2022 yang telah dianalisis pada Bab III laporan ini dapat disimpulkan telah terealisasi dengan sangat baik (rerata angka realisasi di atas 90%). Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari mulai Kepala Badan hingga para Pelaksana di lingkungan Badan Pengawasan untuk mewujudkan seluruh target yang ditetapkan demi memenuhi akuntabilitas terhadap publik secara maksimal.
2. Hampir keseluruhan indikator kinerja yang eksisting pada tahun 2022 memiliki tren menaik dibandingkan tahun kinerja sebelumnya, yang mana masing-masingnya memiliki nilai yang memuaskan.

Segala bentuk keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2022 merupakan suatu sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh aparatur Badan Pengawasan untuk dapat lebih meningkatkan lagi kinerjanya di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tugas dan Fungsi	15
C. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	19
1. Visi dan Misi	19
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	25
SASARAN 1: Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien.....	25
SASARAN 2: Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif.	29
SASARAN 3: Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	32
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
Lampiran-Lampiran:	
1. Struktur Organisasi.	
2. Indikator Kinerja Utama.	
3. Matriks Renstra 2020-2024.	
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP.	
5. Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022.	
6. Perjanjian Kinerja 2021, 2022.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan di bawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan. Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan dan pedoman penanganan pengaduan serta akses kemudahan dalam penyampaian Laporan / Pengaduan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi jumlah dan kompetensi keahliannya untuk melaksanakan tugas pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup dan obyek pengawasan, serta dilandasi oleh nilai – nilai:

a. Akuntabilitas

Nilai yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanatkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang serta berdisiplin.

b. Inovatif dan kreatif

Nilai yang mampu membawa perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik dengan hasil yang prima, berwawasan ke depan, adil, jujur, tegas, namun rendah hati.

c. Profesional

Nilai yang memiliki tingkat integritas moral yang tinggi, keahlian dan keterampilan yang berorientasi ke masa depan.

d. **Transparan**

Nilai yang bersifat terbuka dan tidak ditutup – tutupi serta mudah diakses dari segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

1. Sumber Daya Manusia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN yang terdiri dari:

Pejabat Struktural

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 orang
- Pejabat Eselon IV : 16 orang

Hakim Tinggi : 41 orang

Hakim Yustisial : 25 orang

Pejabat Fungsional

- Auditor : 32 orang
- Auditor Kepegawaian : 8 orang
- Pustakawan : 2 Orang
- Pranata Komputer : 3 orang
- Analis Kepegawaian : 3 Orang
- Arsiparis : 1 Orang

Pelaksana : 24 orang

PPNPN

: 14 orang

Pada tahun 2022, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pelaksana, dan PPNPN.

2. Penanganan Pengaduan

Per tahun 2022, jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.877 pengaduan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel I.

Tabel I. Jumlah Pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.530
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	259
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.088
Total Tahun 2022		3.877
Sisa Tahun 2021		267
Jumlah Total		4.144

Tindak Lanjut atas penanganan pengaduan diperinci dalam Tabel II.

Tabel II. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2022

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		556
2.	Selesai diproses		3.321
	a. Diperiksa Tim Bawas	100	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28	
	c. Konfirmasi	86	
	d. Klarifikasi	751	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	196	
	a. Dijawab Surat	1064	

	b. Pelaksanaan Pemantauan	71	
	h. Diarsipkan	103	
	i. Gabung berkas	915	
	j. Dicabut	7	
Jumlah		3.321	3.877

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim, antara lain:

Nama : MIT

Satuan Kerja : Hakim Pengadilan TUN Manado

Hukuman Disiplin : Sanksi berat - pemberhentian tidak dengan hormat

Nama : MIM

Satuan Kerja : Hakim PA Nabire

Hukuman Disiplin : Sanksi berat - pemberhentian tidak dengan hormat

Nama : HGU

Satuan Kerja : Hakim PN Bondowoso dahulu PN Tarakan

Hukuman Disiplin : Sanksi berat - pemberhentian tidak dengan hormat

Nama : SWP

Satuan Kerja : Hakim PN Cilacap dahulu Hakim PN Serang

Hukuman Disiplin : Sanksi berat - pemberhentian tetap dengan hak pensiun

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 271 aparat peradilan, yang dapat pembaca perhatikan pada Tabel III.

Tabel III. Hukuman Disiplin Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	22	21	102	145

	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2	Panitera	1	4	9	14
3	Sekretaris	3	2	4	9
4	Panitera Muda	1	5	20	26
5	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6	Jurusita	2	2	3	7
7	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10	Staf	9	4	6	19
11	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

5. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Reguler pada 158 (seratus lima puluh delapan) satker. Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 76 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 66 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 7 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 9 satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel IV. Data Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah Temuan	Judul Temuan
1	Manajemen Peradilan	506	Pimpinan pengadilan belum melakukan pembinaan secara khusus kepada para hakim. Program kerja sudah dibuat namun dalam pembuatannya tidak dibuat Tim Perumusan perencanaan program kerja yang melibatkan seluruh jajaran baik hakim, Pegawai, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan tenaga PPNPN (honorar). Uraian Tugas/Job Description Pengadilan sudah menyusun Monitoring dan Evaluasi SOP namun belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001 Tahun 2012. Sudah tersedia ruangan dan pelayanan Posbakum namun administrasi dan pencatatan kegiatan yang dilakukan oleh petugasnya belum memenuhi ketentuan Perma No. 1 Tahun 2014, seperti tidak adanya formulir-formulir dan laporan. Ditemukan adanya pelaksanaan Rapat koordinasi yang tidak Kontinyu sesuai Program kerja tahunan Tahun 2022, dan juga dokumennya tidak lengkap, seperti: tidak ada surat undangan, hasil notulen tidak ada dan juga penyusunan hasil rapat koordinasi yang tidak sesuai dengan urutan. Ditemukan adanya SOP tentang Informasi dan Layanan Pengaduan yang belum memasukkan laporan ke dalam Siwas Mahkamah Agung RI. Ditemukan adanya beberapa bagian kegiatan dalam Program Kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Sibolga yang belum dilaksanakan sampai saat pemeriksaan Reguler dilaksanakan yaitu:

			<p>Melakukan Eksaminasi putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT); Mengadakan diskusi hukum 4 kali dalam satu tahun. Tidak ditemukan adanya “kegiatan Perencanaan” dalam Program Kerja tahun 2022 pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Padahal di dalam Program Kerja Tahun 2022 Bidang Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan angka ke 7 menyebutkan bahwa salah satu kegiatannya adalah Membuat Perencanaan dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Hawasbid 3 bulan sekali. Panitera Pengadilan telah melaksanakan rapat tentang hasil temuan Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan oleh Panitera bersama Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita, akan tetapi dari dokumen yang disajikan berupa Undangan, Daftar hadir dan dokumentasi berupa foto yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022, 13 Oktober 2022, 27 September 2022 adalah dokumen yang baru dibuat, tidak pernah dilaksanakan rapat berjenjang di kepaniteraan, sebagaimana keterangan dari notulen rapat. Ketua Pengadilan belum melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Layanan PTSP, SOP Layanan Informasi Publik, Layanan Pengaduan dan tidak ada monitoring atas SOP tersebut setiap tahun sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan.</p>
2	Administrasi Persidangan	831	<p>Dalam putusan sela perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PA Ksn yang memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan Sumpah Suppletioir pada halaman 6 Hakim membacakan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut menetapkan dan seterusnya, tetapi dalam berita acara sidang halaman 18 disebutkan memperhatikan ketentuan Pasal 182 R.Bg. dan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini mengadili sebelum memutus pokok perkara dan seterusnya. Dalam perkara Nomor 75 /Pdt.G/2022/PA Ksn putus tanggal 20 Juli 2022 diketahui hal-hal sebagai berikut : Amar putusan pada angka 3 disebutkan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar dan seterusnya, sedangkan pada berita acara sidang amar putusan angka 3 disebutkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar dan seterusnya; Pada waktu putusan Termohon tidak hadir tetapi relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon tidak ada pada berkas perkara. Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara yang sudah putus ke meja III/Panmud Hukum tidak memakai buku ekspedisi , dan ada perkara yang sudah diserahkan tetapi tidak ada di rak arsip. Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Tgt, 288/Pdt.G/2021/PA.Tgt. dan 4/Pdt.G/2022/PA.Tgt. Perkara nomor : 217/Pdt.G/2022/PA.Tgt. Dalam berita acara tidak dimuat kesimpulan Pemohon untuk bersedia memberikan mut’ah berupa uang tunai Rp. 5.000.000 dan nafakah Iddah Rp. 3.000.000, tetapi dalam putusan yang tanpa nomor halaman (lembar keempat dari belakang) dipertimbangkan Pemohon telah sanggup memberi uang mutah dan nafakah iddah dan dimasukkan dalam amar putusan . Demikian juga perkara nomor : 212/Pdt.G/2022/PA.Tgt. dalam BAS tidak ada kesanggupan Pemohon membrikan mut’ah berupa emas 10 gram, nafakah iddah Rp.4.500.000, tetapi dalam putusan halaman 13 dipertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut dan dimasukkan dalam amar. Tidak ada buku agenda rapat musyawarah yang mencatat pendapat hakim dan argumentasi hukumnya. Perkara nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt. Pernyataan para pihak menerima penjelasan mediasi, tetapi tidak ada nama hari dan tanggal memberi penjelasan. Perkara nomor : 217/Pdt.G/2022/PA.Tgt. Laporan mediasi ada kesepakatan sebagian, mengenai pembagian 1/3 gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon. Akan tetapi dalam format laporan tidak diikuti klausul agar dikuatkan dalam akan perdamaian. Perkara nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt. Dalam petitum gugat Penggugat mohon sita jaminan, dalam putusan dipertimbangkan telah ditolak dalam putusan sela tanggal 14 September 2021, tetapi dalam berita acara sidang tidak ada putusan sela yang meolak sita jaminan tersebut. Perkara nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Tgt. berita acara sidang tanggal 20 April 2022, belum ditanda tangani oleh Ketua Majelis.</p>
3	Administrasi Perkara	1020	<p>Dari hasil analisis pada dokumen kontrol penggunaan biaya proses diketahui bahwa terdapat pembelian barang tidak sesuai lampiran SK Ketua nomor W-25-A6/3/HK.05/1/2022 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya. Data perkara gugatan sederhana belum lengkap, ada yang belum diinput antara lain nilai sengketa, court calender, tanggal pemberitahuan bunyi putusan. Bahwa berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan oleh kepaniteraan Gugatan dan Permohonan kepada Panmud hukum dengan menggunakan buku kendali saja tanpa dibuatkan berita acara penyerahan dari Panmud Gugatan dan Permohonan. Perincian biaya perkara dalam SK tersebut tidak ditulis secara detail penggunaannya beserta perincian nominal biayanya. Pengisian Buku Register Induk Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dilakukan secara tertib dan cermat, banyak kolom-kolom yang tidak diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengisian Buku Register Induk Perkara Perdata tidak dilakukan secara tertib dan cermat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya pemeriksaan setempat, hanya berupa kwitansi dari</p>

			kasir yang diterima oleh Jurusita. Belum ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang media massa yang dipergunakan untuk pengumuman pemanggilan sidang dalam perkara perceraian yang tidak diketahui domisili tergugatnya. Tidak ada pengumuman sisa panjar perkara secara berkala melalui website/ papan pengumuman. Tanggal minutasasi pada register maupun SIPP (uji petik perkara Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bbu, 123/Pid.B/2022/PN Bbu, 130/Pid.Sus/2022/PN Bbu, 131/Pid.B/2022/PN Bbu) berbeda dengan tanggal minutasasi pada buku kontrol. Dalam berkas tilang (uji petik tilang tanggal 4 November 2022, bukti pelanggaran lalu-lintas tidak diisi dengan amar putusan, tidak ditandatangani Hakim maupun Panitera Pengganti. Petikan putusan tidak disampaikan dalam waktu segera setelah putusan diucapkan kepada terdakwa, PU dan Rutan.
4	Administrasi Umum	1762	Dari hasil analisis dokumen terhadap pembebanan biaya "jamuan kudapan" pelantikan untuk CPNS menjadi PNS dengan SPBy Nomor 00003/PB/402902/2022 tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp990.000,- ditemukan ketidaksesuaian bukti pembelian berupa kuitansi pembelian makan ayam bakar dengan harga satuan Rp45.000,- sebanyak 22 dus (akun 521119). Pembayaran Tunjangan Kinerja yang tidak Pengendalian internal atas pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (bbm) yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Laporan Keuangan DIPA 04 tidak dibuat oleh Satuan Kerja Dari hasil permintaan dokumen terhadap Laporan Keuangan DIPA 03 Tahun 2021 dan Semester I 2022 dan pengamatan pada website pengadilan diketahui laporan keuangan tersebut tidak dibuat oleh Satuan Kerja. Dari hasil pemeriksaan kas pada keuangan DIPA 01 dan DIPA 04 serta keuangan perkara, ditemukan fakta bahwa Uang Persediaan (UP) tidak disimpan di dalam brankas melainkan dalam amplop yang tiap harinya dibawa pulang oleh Bendahara Pengeluaran dengan nilai UP sebesar Rp30.000.000 (DIPA 01) dan Rp5.000.000 (DIPA 04). Sedangkan untuk keuangan perkara disimpan pada laci meja kerja Panitera Muda Hukum selaku Kasir dan Bendahara Penerimaan yang pada saat pemeriksaan kas memiliki jumlah fisik sebesar Rp3.145.000,00. Pengelolaan PNPB (penerimaan dan penyeroran) belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penatausahaan barang persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara online melalui aplikasi SAKTI maupun cek fisik dilapangan serta wawancara pada Operator BMN diperoleh kondisi bahwa terdapat BMN dengan kondisi rusak berat namun belum diusulkan untuk penghapusan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengembalian sisa panjar, aplikasi SIPP dan aplikasi MISS serta informasi yang diperoleh dari Kasir, diketahui bahwa seluruh sisa panjar biaya perkara melalui e-court dikembalikan secara manual /belum secara elektronik (transfer). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja (52) DIPA 01 TA 2022, menunjukkan masih terdapat dokumen pertanggungjawaban belanja berupa konsumsi rapat (521119) yang belum sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai. Ruang Perpustakaan sudah cukup memadai, belum dibuat SK penunjukan petugas Pustakawan dan pengelolaannya belum mengikuti ketentuan pengelolaan Perpustakaan. Pejabat Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Umum dan Keuangan belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Banyak pegawai yang ada merangkap pekerjaan bagian Fungsional dan Struktural seperti Jurusita Pengganti merangkap petugas Perpustakaan tanpa ada SK Ketua, Arsiparis merangkap tugas Bendahara DIPA 04 dan lain-lain. Barang Milik Negara yang dimiliki saat ini banyak yang kondisi dianggap sudah rusak atau tidak layak pakai, sudah diusulkan untuk dihapuskan, tetapi pada data Aplikasi BMN/Aplikasi BIMA untuk barang-barang yang akan dihapus sebagian besar dilaporkan kondisinya masih "Baik", belum diajukan Perubahan Status kondisi atas BMN, dari kondisi baik menjadi kondisi Rusak Berat. Pengadilan sebenarnya kekurangan Mebelair terutama Meja kerja dan kursi kerja, sehingga barang inventaris kantor /BMN yang sudah di lelang saat Penghapusan BMN pada tahun 2015 sampai sekarang masih dipinjamkan oleh pemenang lelang penghapusan, setiap pengajuan Anggaran RKAKL untuk pengadaan Barang mebelair mengganti tidak pernah dikabulkan.
5	Kinerja Pelayanan Publik	661	Pengadilan belum menetapkan biaya perolehan informasi dan belum membuat laporan pelayanan informasi. Pengadilan belum pernah melakukan evaluasi pertiga bulan sekali terhadap pelaksana perjanjian kerjasama dan Lembaga penyediaan belum pernah melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. Petugas pelayanan pengaduan yang ditunjuk tidak dapat masuk (log in) kedalam aplikasi Siwas dan belum membuat register pengaduan dan juga belum membuat laporan penanganan pengaduan setiap bulannya yang di lapoirkan ke Sekretaris Mahkamah agung. Tidak ada guiding block sebagai salah satu Sarana untuk memandu para pihak penyandang Tunanetra untuk dapat mengakses kepentingannya Pelayanan di Pengadilan. Pada situs resmi pengadilan, perihal bagaimana cara mendapatkan informasi publik, di dalam bagan prosedur mendapatkan informasi masih mengacu pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Padahal SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh SK KMA Nomor 2-

			144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keterbukaan Informasi Pengadilan belum menyediakan formulir-formulir dan buku register permohonan informasi serta SK Ketua Pengadilan tentang Biaya Perolehan Informasi di Pengadilan. Satuan kerja belum menetapkan biaya perolehan informasi sesuai dengan peraturan/kebijakan terbaru. Satuan kerja telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi, tetapi masih berpedoman kepada peraturan/kebijakan yang sudah dicabut. Adapun sebagaimana pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan: Kewajiban Pengadilan; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pengadilan; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, adalah belum disediakan secara optimal oleh satuan kerja. Satuan kerja telah menyediakan sarana Meja Pengaduan dan belum ada pengaduan yang masuk serta petugas terkait sudah mempunyai akun/username serta dapat mengoperasikan aplikasi SIWAS. Tetapi satuan kerja belum mensosialisasikan tentang proses pengaduan melalui aplikasi SIWAS, tetapi hanya nomor Whatsapp. Satuan kerja belum mengumumkan Waktu dan Maklumat Pelayanan terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.
--	--	--	--

6. Monitoring atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan dalam Tahun 2022, telah melakukan monitoring sebagai bentuk tindak lanjut atas pemeriksaan reguler melalui aplikasi Wastitama pada 158 (seratus lima puluh delapan) satker. Pemeriksaan Monitoring pada wilayah I berjumlah 46 satker, pada wilayah II berjumlah 51 satker, pada wilayah III berjumlah 32 satker, dan wilayah IV berjumlah 29 satker.

7. Audit Kinerja

Pelaksanaan audit kinerja dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan mengukur beberapa kinerja, yaitu:

– Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ‘Ketaatan Penyampaian Panggilan’ lebih dominan dibandingkan temuan-temuan lainnya dalam bidang yang sama, yakni dengan jumlah mencapai 280 dari 673 temuan (atau 41,60% dari total temuan pada Bidang Penyelesaian Perkara).

– Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait ‘Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi’ adalah yang paling dominan, yakni mencapai 125 (seratus dua puluh lima) temuan (26,10% dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) temuan), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

– Bidang Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang ‘Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara’ menggambarkan bahwa temuan terkait ‘Pengambilan Sisa Panjar’ merupakan yang paling dominan, yakni mencapai 123 (seratus dua puluh tiga) temuan (26,06%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, sehingga

perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong efektivitas pengambilan sisa panjar.

– **Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan**

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ‘Ketersediaan Sarana dan Prasarana’ mencapai 208 (dua ratus delapan) temuan (65,20%) dari 319 (tiga ratus sembilan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2021 (pelaksanaan Tahun 2022) terdapat 3 Satker (4,05%) memperoleh nilai A, 65 Satker (87,84%) memperoleh nilai BB, dan 6 Satker (8,11%) memperoleh nilai B.

Capaian nilai SAKIP tahun 2021 (pelaksanaan tahun 2022) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat penurunan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 3 Satker (4,05%) dan B (baik) 6 Satker (8,10%), namun untuk kategori BB (sangat baik) terdapat kenaikan dari 53 Satker (71,62%) menjadi 65 Satker (87,83%). Kenaikan dan penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan kriteria penilaian, yang mana sebelumnya menggunakan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 menjadi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 dimana perubahan tersebut digunakan antara lain untuk mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi.

9. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 284/SEK/SK/II/2022 tentang pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2022 telah menugaskan kepada Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM.

Tim Penilai Internal (TPI) melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor: 1236/SEK/OT.01.1/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 Hal Permintaan Pelaksanaan PMPZI terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 diperoleh rincian evaluasi dan penilaian atas PMPZI menuju WBK terhadap 695 (enam ratus sembilan puluh lima) satuan kerja.

10. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai APIP, Badan Pengawasan melakukan kegiatannya, di antaranya, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA K/L, Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ, Reviu Revisi Anggaran, Reviu atas Penerimaan PNBPN, Reviu Hibah Liaison Officer (LO), Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Audit PBJ, Pemeriksaan Keuangan, serta Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP (SPI Pemerintah).

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester I Tahun 2022 yang terdiri dari 662 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp52.073.631.979,87 dengan 1.537 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp38.962.803.734,06 dengan status sebagai berikut.

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.526 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp36.318.964.906,00 (93%).
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06 (7%).

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan semester I Tahun 2022 telah selesai yaitu sebanyak 1.526 rekomendasi atau sebesar 100%.

12. Inspeksi Mendadak (Sidak)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check-on-the-spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Selama tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Sidak sebanyak 15 kali kegiatan pada objek pemeriksaan (obrik) yang berbeda-beda.

13. Mystery Shopper (MS)

Mystery Shopper (MS) adalah instrumen penilaian dengan cara menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung kepada satuan kerja dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati dan menilai berjalan atau tidaknya sistem manajemen anti penyuapan, menilai integritas pelayanan pengadilan dan menilai integritas aparaturnya pengadilan. Selama tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan MS sebanyak 46 kali kegiatan pada objek pemeriksaan (obrik) yang berbeda-beda.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari:

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

1) Sekretariat Badan Pengawasan

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan, serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan, serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi: Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan, serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan, serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;

- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi: penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan, dan perilaku aparatur pengadilan. Sedangkan sasaran pengawasan meliputi: lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2020-2024

- 1. Visi dan Misi
- 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

- 1. Pengukuran Kinerja
- 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

B. Realisasi Anggaran

IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung,” dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan misi-misi, antara lain, sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan, serta Perencanaan Keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah “Terwujudnya Pengawasan yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan yang Berintegritas dan Berkinerja.”

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat Dan Mengintensifkan Pengawasan Fungsional Yang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan Dan Peradilan Tingkat Banding Di Bidang Pengawasan.
3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
4. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun, yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada Tabel V.

Tabel V. Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu		
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan		
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu		
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti		
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu		
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja		
	Pengadilan yang dilakukan Audit Barang dan Jasa		
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan		
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		
	Peningkatan Zona Integritas		
	Pemeriksaan Probitas		
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana		
	Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang		
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assessment		
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan		

	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan
--	--	--	--

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan disajikan pada Tabel VI.

Tabel VI. Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ditambah dengan jumlah sisa pengaduan tahun lalu (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu;	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan Triwulan website dari Ortala
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;	Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasi dibagi dengan jumlah hukuman disiplin (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan Bulanan website dari Ortala
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu.	Jumlah hasil pemeriksaan kasus tepat waktu dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan kasus (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.	Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan hasil pengawasan (x 100%)	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2022 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2022 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel VII.

Tabel VII. Rencana Kinerja Badan Pengawasan MA RI Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET JANGKA MENENGAH	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%				75%	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%				100%	-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%				100%	Rp6.705.720.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	80%	-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	100%				80%	Rp72.080.000

	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%				100%	-	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	81 LHP				81 LHP	Rp3.578.345.000	
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	73 LHP				73 LHP	Rp3.231.804.000	
	Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	5 LHP				5 LHP	Rp284.136.000	
	Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	8 LHP				8 LHP	Rp295.080.000	
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	9 LHP				9 LHP	Rp317.268.000	
	Peningkatan Zona Integritas	158 LHP				158 LHP	Rp6.650.474.000	
	Pemeriksaan Probitas	10 Kegiatan				10 Kegiatan	Rp212.168.000	
	Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp743.276.000	
	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp644.960.000	
	Pegawai yang mengikuti assessment	20 Orang				20 Orang	Rp115.000.000	
	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp899.390.000	
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim	20 LHP		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	004 Pelaksanaan MKH		20 LHP	Rp100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2022, sebagaimana terlihat pada Tabel VIII.

Tabel VIII. Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100% (3.081 pengaduan)	100% (3.081 pengaduan)	100%
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%	99,87% (3.077 pengaduan)	133,16%
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100% (271 orang)	100% (271 orang)	100%
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100% (149 LHP)	100% (149 LHP)	100%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%	81,59%	101,99%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%	100% (1.526 temuan)	125%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100% (158 LHP)	100% (158 LHP)	100%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100% (158 LHP)	100% (158 LHP)	100%
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100% (73 LHP)	100% (73 LHP)	100%

Audit Pengadaan Barang dan Jasa	100% (7 satker)	100% (7 satker)	100%
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100% (129 satker)	538,75% (695 satker)	538,75%
Probitas Audit PBJ	100% (6 LHP)	100% (6 LHP)	100%
Evaluasi SAKIP yang selesai dilakukan	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%
Reviu	100% (25 LHP)	100% (25 LHP)	100%
Liaison Officer (LO)	100% (3 LHP)	100% (3 LHP)	100%
Pemeriksaan Keuangan	100% (9 LHP)	100% (9 LHP)	100%

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini merupakan lokus analisis atas kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2022, yang mana keluarannya telah diperinci pada Tabel VIII sebelumnya. Dalam melaksanakan misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, Badan Pengawasan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kerjanya, diuraikan sebagai berikut.

SASARAN 1: Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien

Indikator kinerja ke-1: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (3.069 pengaduan)	100% (3.069 pengaduan)	100%
2022	100% (3.877 pengaduan)	100% (3.877 pengaduan)	100%

Untuk sasaran 1 mengenai terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif, dan efisien, menyangkut indikator kinerja ke-1 yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.877 pengaduan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti sehingga capaian kerjanya 100%, tindaklanjut atas surat pengaduan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel IX. Perincian Jumlah Pengaduan Badan Pengawasan

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut
1.	Masih Proses Penyelesaian	556

2.	Selesai diproses		3.321
	a. Diperiksa Tim Bawas	100	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28	
	c. Konfirmasi	86	
	d. Klarifikasi	751	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	196	
	a. Dijawab Surat	1064	
	b. Pelaksanaan Pemantauan	71	
	h. Diarsipkan	103	
	i. Gabung berkas	915	
	j. Dicabut	7	
	Jumlah	3.321	3.877

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan diantaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (*E-post*). Disamping itu adanya kemudahan Aplikasi SIWAS bagi masyarakat dalam penyampaian pengaduan, sehingga kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Indikator kinerja ke-2: Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	75%	68% (2.082 pengaduan)	90,67%
2022	75%	88,93% (3.448)	118,57%

		pengaduan)	
--	--	------------	--

Untuk sasaran 1 mengenai terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif, dan efisien, menyangkut indikator kinerja ke-2 yaitu persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu. Pada Tahun 2022, Badan Pengawasan dalam penanganan pengaduan telah selesai diproses tepat waktu sejumlah 3.448 surat pengaduan dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah
1	Diperiksa Tim Bawas	112
2	Delegasi ke Tingkat Banding	28
3	Konfirmasi	89
4	Klarifikasi	783
5	<i>Memorandum / Delegasi Internal</i>	195
6	Dijawab Surat	1.064
7	Pelaksanaan Pemantau	71
8	Diarsipkan	103
9	Gabung berkas	996
10	Dicabut	7
11	Konfirmasi dan Klarifikasi	0
Jumlah		3.448

Jumlah tindak lanjut atas pengaduan sebanyak 3.877, sedangkan pengaduan yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dari jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan sebanyak 3.448 pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016, sehingga capaian kinerja mencapai 118,57% dari target tahun 2022.

Capain kinerja penanganan pengaduan yang tepat waktu pada tahun 2022 mengalami peningkatan 27.90% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut, salah satunya, disebabkan oleh peningkatan sebesar 26,49% atas jumlah pengaduan yang masuk per tahun 2022 dibandingkan pengaduan yang masuk pada tahun 2021 yang sebanyak 3.065 pengaduan. Kenaikan persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti tepat waktu ini merupakan suatu dampak telah diterapkannya optimalisasi fitur serta implementasi menyeluruh atas aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (ePost) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dimana seluruh jenis tindak lanjut proses penyelesaian penanganan pengaduan telah memanfaatkan aplikasi SIWAS sehingga lebih cepat dan efisien. Dengan adanya optimalisasi aplikasi SIWAS dan ePost tersebut terbukti memberikan dukungan percepatan pelayanan penanganan pengaduan dan meningkatkan tata kelola hasil pemeriksaan pengaduan.

Indikator kinerja ke-3: Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (284 orang)	100% (284 orang)	100%
2022	100% (271 orang)	100% (271 orang)	100%

Untuk sasaran 1 mengenai terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif, dan efisien, menyangkut indikator kinerja ke-3 yaitu persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan. Pada tahun 2022 aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 271 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Hukuman disiplin berat sebanyak 52 orang
- Hukuman disiplin sedang sebanyak 52 orang
- Hukuman disiplin ringan sebanyak 167 orang.

Dari jumlah tersebut, persentase terbesar aparat yang dijatuhi hukuman disiplin adalah hakim/hakim ad hoc sejumlah 146 orang (53,87%).

Pada tahun 2021, aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 284 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Hukuman disiplin berat sebanyak 74 orang
- Hukuman disiplin sedang sebanyak 60 orang
- Hukuman disiplin ringan sebanyak 150 orang.

Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung RI yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik. Di samping itu, hal tersebut juga didukung oleh semakin efektifnya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel X. Hukuman Disiplin Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	22	21	102	145
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2	Panitera	1	4	9	14
3	Sekretaris	3	2	4	9
4	Panitera Muda	1	5	20	26

5	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6	Jurusita	2	2	3	7
7	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10	Staf	9	4	6	19
11	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

Indikator kinerja ke-4: Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (78 LHP)	72% (56 LHP)	72%
2022	100% (149 LHP)	100% (149 LHP)	100%

Untuk sasaran 1 mengenai terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif, dan efisien, menyangkut indikator kinerja ke-4 yaitu persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus tepat waktu. Pada tahun 2022 Badan Pengawasan telah menindaklanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, baik melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun melalui delegasi Tingkat Banding, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa LHP sejumlah 149 laporan dengan jumlah LHP yang tepat waktu juga sebanyak 149 LHP. Dengan demikian, capaian kinerja persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dari hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tersebut yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menandakan kinerja dari Badan Pengawasan setiap tahunnya. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 28% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya kinerja positif dari para aparatur pengawasan dalam mendukung efisiensi administrasi LHP Kasus dalam lingkup Badan Pengawasan.

SASARAN 2: Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif.

Indikator kinerja ke-1: Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	80% (29 LHP)	91% (33 LHP)	114%
2022	80%	81,59%	101,99%

Untuk sasaran 2 mengenai terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal yang efektif, menyangkut indikator kinerja ke-1 yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah merekomendasikan hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti yaitu berupa Monitoring sejumlah 33 satker dengan capaian kinerja 114% yaitu sebagai tindak lanjut dari temuan atas Pemeriksaan Reguler. Monitoring dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sejauh mana temuan dalam pemeriksaan reguler dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja untuk melakukan perbaikan ke depan.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah menerapkan Aplikasi Wastitama untuk Pemeriksaan Reguler dan Monitoring melalui SK Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama. Badan Pengawasan telah merekomendasikan hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti yaitu berupa Monitoring atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler sejumlah 4.775 temuan. Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sejauh mana temuan dalam pemeriksaan reguler dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja untuk melakukan perbaikan ke depan. Akan tetapi, pada tahun 2022 terdapat sejumlah 102 temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan demikian, jumlah temuan pemeriksaan reguler yang seharusnya ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 3.896 temuan (capaian kinerja sebesar 101,99%).

Realisasi Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 namun demikian jika dilihat dari capaian, maka target kinerja 2022 dapat dicapai. Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan monitoring tindak lanjut atas pemeriksaan reguler pada 158 Satuan Kerja (Satker) sebagaimana tersaji dalam Tabel XII.

Tabel XI. Data Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler Tahun 2022

Jumlah Temuan	Tindak Lanjut Temuan		Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
	Sesuai	Belum Sesuai		
4.775	3.794	687	192	102

Tabel XII. Data Monitoring Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Reguler per Wilayah Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	23	33	9	11	76
Peradilan Agama	17	12	21	16	66
Peradilan Militer	1	3	2	1	7
Peradilan TUN	5	3	-	1	9
<i>Total</i>	46	51	32	29	158

Indikator kinerja ke-2: Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	80%	79% (1.302 rekomendasi)	98,75%
2022	80%	100% (1.526 temuan)	125%

Untuk sasaran 2 mengenai terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal yang efektif, menyangkut indikator kinerja ke-2 yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2022 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester I Tahun 2022 yang terdiri dari 662 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp52.073.631.979,87 dengan 1.537 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp38.962.803.734,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.526 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp36.318.964.906,00 (93%).

2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06 (7%).

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan semester I Tahun 2022 telah selesai yaitu sebanyak 1.526 rekomendasi atau sebesar 100%.

Indikator kinerja ke-3: Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (53 LHP)	90,56% (48 LHP)	90,56%
2022	100% (158 LHP)	100% (158 LHP)	100%

Untuk sasaran 2 mengenai terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal yang efektif, menyangkut indikator kinerja ke-2 yaitu Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu.

Pada Tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 53 Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja 90,56%. Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja, yaitu pada peradilan umum sejumlah 26 Satker, peradilan agama sejumlah 24 Satker, peradilan militer sejumlah 0 Satker, peradilan TUN sejumlah 3 Satker.

Pada Tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 158 Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja 100%. Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 158 (seratus lima puluh delapan) Satuan Kerja, yaitu pada peradilan umum sejumlah 76 Satker, peradilan agama sejumlah 66 Satker, peradilan militer sejumlah 7 Satker, peradilan TUN sejumlah 9 Satker. Pemeriksaan reguler pada tahun 2022, yang mana realisasinya naik 9,44% terhadap tahun 2021, untuk ketepatan waktunya pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

SASARAN 3: Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja ke-1: Pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (42 LHP)	126% (53 LHP)	126%
2022	100% (158 LHP)	100% (158 LHP)	100%

Untuk sasaran 3 mengenai terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel, menyangkut indikator kinerja ke-1 yaitu pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler. Pada Tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 158 Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja 100%.

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada bulan Januari, Februari, Maret, September, dan Oktober pada 158 (seratus lima puluh delapan) Satuan Kerja, seperti tabel berikut:

Tabel XIII. Data Pengawasan Reguler Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	23	33	9	11	76
Peradilan Agama	17	12	21	16	66
Peradilan Militer	1	3	2	1	7
Peradilan TUN	5	3	-	1	9
<i>Total</i>	46	51	32	29	158

Temuan Hasil pemeriksaan reguler tersebut, dapat dilihat pada Tabel XII sebelumnya.

Indikator kinerja ke-2: Pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan audit kinerja

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (46 LHP)	106% (49 LHP)	106%
2022	100% (73 LHP)	100% (73 LHP)	100%

Untuk sasaran 3 mengenai terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel, menyangkut indikator kinerja ke-2 yaitu pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan audit kinerja. Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2022 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas sejumlah 73 Satuan Kerja (Satker), yang mana telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 73 satker dengan capaian kinerja 100%.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dan mengukur Kinerja Penyelesaian Perkara, Pelaksanaan Eksekusi, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, serta Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan pada 73 (tujuh puluh tiga) satker sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel XIV. Klasifikasi Pemeriksaan Audit Kinerja pada Beberapa Wilayah dan Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	16	7	9	39
Peradilan Agama	11	4	11	3	29

Peradilan TUN	1	0	1	1	3
Peradilan Militer	1	0	1	0	2
Total					73

Catatan:

Wilayah I : Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2022 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja yang berorientasi pada Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 73 (tujuh puluh tiga) satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja, antara lain: 1) Pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 39 satker; 2) Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 29 satker; 3) Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 3 satker; dan 4) Di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 2 satker.

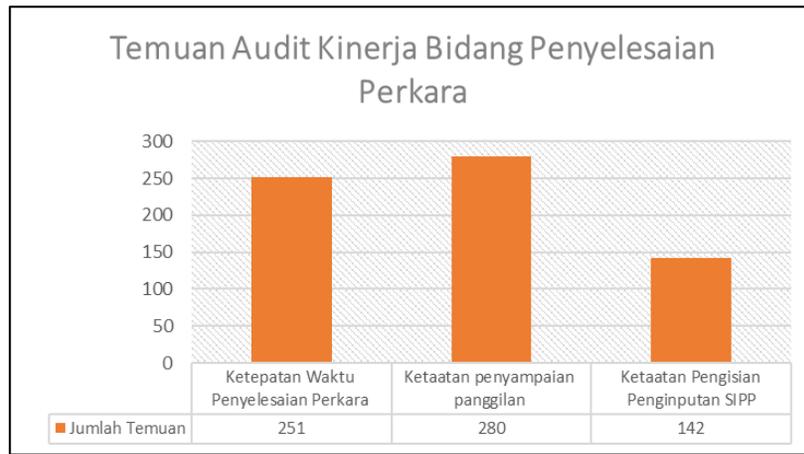
Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan, di antaranya, sebagai berikut.

1) Hasil Temuan Bidang Penyelesaian Perkara, yang meliputi:

- a) Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara sejumlah 251 temuan.
- b) Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 280 temuan.
- c) Ketaatan Pengisian Penginputan SIPP sejumlah 142 temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja tahun 2022 Bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan temuan terkait Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara mencapai sejumlah 251 temuan (37,30%) dari 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) temuan, Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 280 temuan (41,60%) dari 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) temuan, Ketaatan Pengisian Penginputan SIPP sejumlah 142 temuan (21,10%) dari 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) temuan.

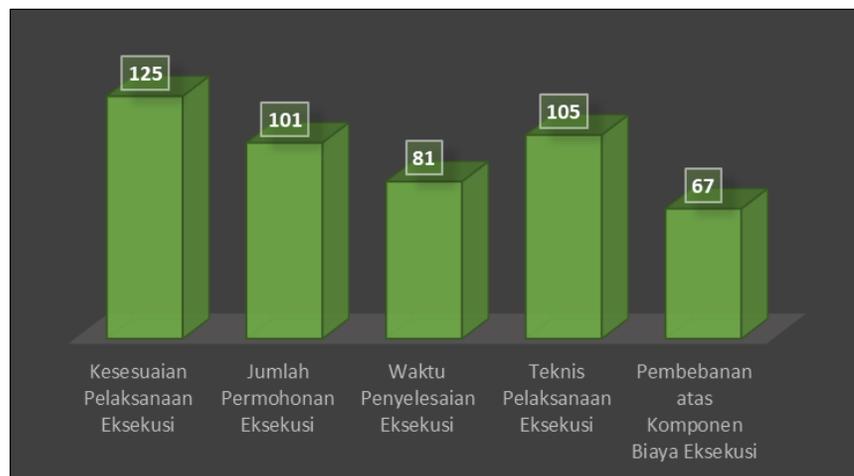
Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait 'Ketaatan Penyampaian Panggilan' lebih dominan dibandingkan temuan-temuan lainnya dalam bidang yang sama, yakni dengan jumlah mencapai 280 dari 673 temuan (atau 41,60% dari total temuan pada Bidang Penyelesaian Perkara).



- 2) Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi, meliputi:
- Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 125 temuan.
 - Pengujian Jumlah Permohonan Eksekusi sejumlah 101 temuan.
 - Waktu Penyelesaian Eksekusi sejumlah 81 temuan.
 - Teknis Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 105 temuan.
 - Pembebanan atas Komponen Biaya Eksekusi sejumlah 67 temuan.

Hasil Temuan Audit Kinerja tahun 2022 Bidang Pelaksanaan Eksekusi sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) temuan terdiri dari Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi mencapai sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) temuan (26,10%), Pengujian Jumlah Permohonan Eksekusi sejumlah 101 (seratus satu) temuan (21,09%), Waktu Penyelesaian Eksekusi sejumlah 81 (delapan puluh satu) temuan (16,91%), Teknis Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 105 (seratus lima) temuan (21,92%), dan Pembebanan atas Komponen Biaya Eksekusi sejumlah 67 (enam puluh tujuh) temuan (13,99%).

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait ‘Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi’ adalah yang paling dominan, yakni mencapai 125 (seratus dua puluh lima) temuan (26,10% dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) temuan), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

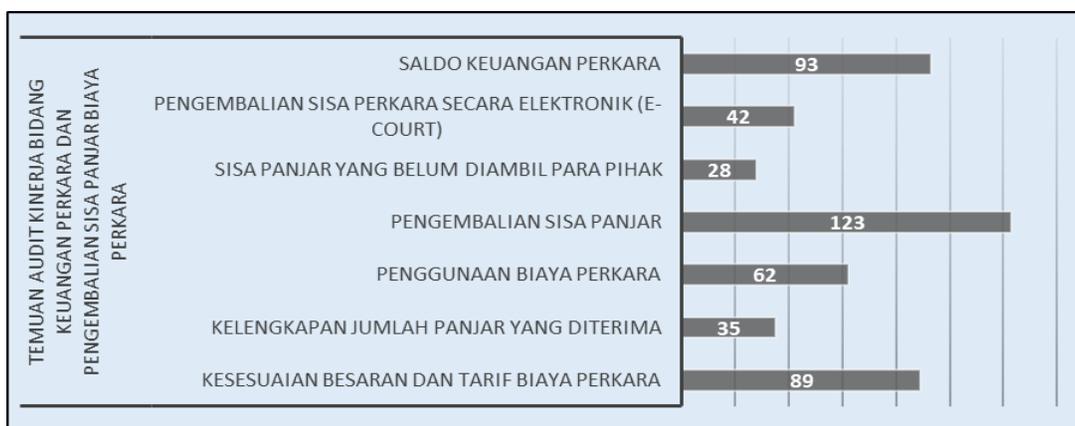


- 3) Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, yang meliputi:
- Kelengkapan Jumlah Panjar yang Diterima sejumlah 35 temuan.

- b) Kesesuaian Besaran dan Tarif Biaya Perkara sejumlah 89 temuan.
- c) Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 62 temuan.
- d) Pengembalian Sisa Panjar sejumlah 123 temuan.
- e) Sisa Panjar yang Belum Diambil Para Pihak sejumlah 28 temuan.
- f) Saldo Keuangan Perkara sejumlah 93 temuan.
- g) Pengembalian Sisa Perkara secara Elektronik (*e-court*) sejumlah 42 temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan temuan terkait Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima sejumlah 35 temuan (7,42%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, Kesesuaian Besaran dan Tarif Biaya Perkara sejumlah 89 temuan (18,86%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 62 temuan (13,14%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, Pengembalian Sisa Panjar sejumlah 123 temuan (26,06%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, Sisa Panjar yang Belum Diambil Para Pihak sejumlah 28 temuan (5,93%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, Pengembalian sisa perkara secara elektronik (*e-court*) sejumlah 42 temuan (8,90%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, dan Saldo Keuangan Perkara sejumlah 93 temuan (19,70%) dari 366 (tiga ratus enam puluh enam) temuan.

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang ‘Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara’ menggambarkan bahwa temuan terkait ‘Pengambilan Sisa Panjar’ merupakan yang paling dominan, yakni mencapai 123 (seratus dua puluh tiga) temuan (26,06%) dari 472 (empat ratus tujuh puluh dua) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong efektivitas pengambilan sisa panjar.



- 4) Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan, yang meliputi:
- a) Ketersediaan Sarana dan Prasarana sejumlah 208 temuan.
 - b) Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 111 temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan sejumlah 208 (dua ratus delapan) temuan

(65,20%) dari 319 temuan serta Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 111 (seratus sebelas) temuan (34,80%) dari 319 temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ‘Ketersediaan Sarana dan Prasarana’ mencapai 208 (dua ratus delapan) temuan (65,20%) dari 319 (tiga ratus sembilan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.



Pada Tahun 2022 Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja untuk target dan realisasi menurun dibandingkan tahun 2021 (106%), namun demikian untuk pencapaian kinerja telah mencapai target kinerja tahun 2022 yaitu 100%, sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat tercapai.

Indikator kinerja ke-3: Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (4 satker)	100% (4 satker)	100%
2022	100% (7 satker)	100% (7 satker)	100%

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada 4 satker dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 4 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 1 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 1 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada 7 satker dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 7 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 2 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 3 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-4: Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (161 satker)	195% (314 satker)	195%
2022	100% (129 satker)	538,75% (695 satker)	538,75%

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 284/SEK/SK/II/2022 tentang pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2022 telah menugaskan kepada Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM.

Tim Penilai Internal (TPI) melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1236/SEK/OT.01.1/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 Hal Permintaan Pelaksanaan PMPZI terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 diperoleh rincian evaluasi dan penilaian atas PMPZI menuju WBK terhadap 695 (enam ratus sembilan puluh lima) satuan kerja yang terdiri dari:

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon 1 di lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1
2	Lingkungan Peradilan Umum a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	41 228
3	Lingkungan Peradilan Agama a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	69 321
4	Lingkungan Peradilan Militer a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8 7
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3 17
Total Unit Kerja yang diajukan		695

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut:

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	21	95
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	107	472
Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	695	128	567

Bersamaan dengan kegiatan Panel TPI PMPZI Mahkamah Agung RI Tahun 2022, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Nomor: B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 Hal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 telah mengatur batas akhir Pengusulan Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diterima secara dalam jaringan (*online*) paling lambat 30 Juni 2022 dan kuota pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 30 (tiga puluh) unit kerja.

Atas kebijakan tersebut, TPI melaksanakan Panel Lanjutan evaluasi PMPZI Tahun 2022 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	133	7	126
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	562	23	539
Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	695	30	665

Dengan rincian hasil sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah	Lolos Panel TPI I	Lolos Evaluasi Lanjutan	Lolos Panel TPI II (Usul sesuai Kuota)
1	Eselon 1 di lingkungan MA Calon Unit Eselon I Berpredikat WBK	1	1	1	1
2	Lingkungan Peradilan Umum c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	41 228	3 28	3 18	3 11
3	Lingkungan Peradilan Agama c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	69 321	17 77	12 42	3 11
4	Lingkungan Peradilan Militer c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8 7	1 0	1 0	1 0
5	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM d. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3 17	0 1	0 0	0 0
Total Unit Kerja yang diajukan		695	128	77	30

Usulan calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejumlah 23 (dua puluh tiga) unit kerja.

No	Nama Unit Kerja
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	Pengadilan Tinggi Gorontalo
4	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
5	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
6	Pengadilan Tinggi Agama Medan
7	Pengadilan Negeri Bengkulu
8	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
9	Pengadilan Negeri Jember
10	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
11	Pengadilan Negeri Mempawah
12	Pengadilan Negeri Pati
13	Pengadilan Negeri Singaraja
14	Pengadilan Negeri Tais
15	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
16	Pengadilan Agama Bengkalis
17	Pengadilan Agama Bulukumba
18	Pengadilan Agama Mimika
19	Pengadilan Agama Padang Panjang
20	Pengadilan Agama Poso
21	Pengadilan Agama Sukoharjo
22	Pengadilan Agama Trenggalek
23	Pengadilan Agama Unaaha

Usulan calon unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM) sejumlah 7 (tujuh) unit kerja.

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
4	Pengadilan Negeri Malang
5	Pengadilan Agama Jakarta Utara
6	Pengadilan Agama Lumajang
7	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Tim Penilai Internal kemudian melakukan penyiapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Manual/Excel hasil revidi Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN) berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 540/BP/ST/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 sebagai tindak lanjut Pengumuman Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Nomor: B/09/PW.03/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022.

Indikator kinerja ke-5: Probity Audit PBJ

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (10 LHP)	280% (28 satker)	280%
2022	100% (6 LHP)	100% (6 LHP)	100%

Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa.

Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan Probity Audit PBJ pada 28 satker dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 10 satker, dengan capaian kinerja 280%. Adapun perincian dari pelaksanaan Probity Audit PBJ pada wilayah I berjumlah 9 satker, pada wilayah II berjumlah 15 satker, pada wilayah III berjumlah 4 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan Probity Audit PBJ pada 6 satker dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 6 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Probity Audit PBJ pada wilayah I berjumlah 3 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 1 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-6: Evaluasi SAKIP yang selesai dilakukan

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%
2022	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%

Untuk sasaran 3 mengenai terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel, menyangkut indikator kinerja

ke-3 yaitu Evaluasi SAKIP yang selesai dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel XV. Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No.	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2020	2021
1.	>90 – 100	AA	-	-
2.	>80 – 90	A	12	3
3.	>70 – 80	BB	53	65
4.	>60 – 70	B	9	6
5.	>50 – 60	CC	-	-
6.	>30 – 50	C	-	-
7.	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 terhadap 74 Satuan Kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

- a. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 12 Satuan Kerja
- b. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori BB (sangat baik) yaitu 53 Satuan Kerja
- c. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori B (baik) yaitu 9 Satuan Kerja.

Capaian nilai SAKIP tahun 2021 terhadap 74 Satuan Kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

- a. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 3 Satuan Kerja
- b. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori BB (sangat baik) yaitu 65 Satuan Kerja

c. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori B (baik) yaitu 6 Satuan Kerja.

Tabel XVI. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 Satuan Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2022)

No	Nama Satker	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Skor	Kategori
		30,00	30,00	15,00	25,00		
1.	Badan Urusan Administrasi	22,20	23,40	12,00	20,00	77,60	BB
2.	Kepaniteraan	23,70	24,00	11,55	20,00	79,25	BB
3.	Ditjen Badilum	23,70	23,10	11,55	19,25	77,60	BB
4.	Ditjen Badilag	24,00	24,00	12,30	20,00	80,30	A
5.	Ditjen Badilmiltun	21,00	21,00	11,10	17,50	70,60	BB
6.	Balibang Diklat Kumdil	21,00	21,00	10,80	17,50	70,30	BB
7.	Badan Pengawasan	23,70	24,00	11,55	18,00	77,25	BB
8.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	21,60	24,60	11,85	21,25	79,30	BB
9.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	22,50	23,40	10,80	16,75	73,45	BB
10.	Pengadilan Tinggi Medan	21,00	21,90	10,80	19,25	72,95	BB
11.	Pengadilan Tinggi Agama Medan	23,10	22,50	11,55	21,25	78,40	BB
12.	Pengadilan Tinggi Militer Tinggi I Medan	23,10	21,00	11,85	22,50	78,45	BB
13.	Pengadilan Tinggi TUN Medan	20,10	20,40	9,75	17,50	67,75	B
14.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	23,70	25,50	11,85	19,25	80,30	A
15.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	22,20	22,50	11,55	18,75	75,00	BB
16.	Pengadilan Tinggi Padang	23,10	24,00	11,85	18,75	77,70	BB
17.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	23,10	24,00	11,85	20,00	78,95	BB
18.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	23,10	24,00	11,55	20,00	78,65	BB
19.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	23,10	24,00	11,85	20,00	78,95	BB
20.	Pengadilan Tinggi Jambi	23,10	21,60	11,55	20,00	76,25	BB
21.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	24,60	22,50	11,85	21,25	80,20	A

No	Nama Satker	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Skor	Kategori
		30,00	30,00	15,00	25,00		
22.	Pengadilan Tinggi Palembang	23,10	22,50	11,85	20,75	78,20	BB
23.	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	22,20	23,70	11,25	18,00	75,15	BB
24.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	21,00	21,90	11,10	18,00	72,00	BB
25.	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	23,10	23,40	11,85	20,00	78,35	BB
26.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	21,60	24,00	11,85	20,00	77,45	BB
27.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	23,10	22,50	11,10	18,00	74,70	BB
28.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	21,00	22,50	12,00	17,50	73,00	BB
29.	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	21,60	21,00	10,50	17,50	70,60	BB
30.	Pengadilan Militer Utama	21,00	21,90	10,95	17,00	70,85	BB
31.	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	21,60	18,00	12,00	20,00	71,60	BB
32.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	19,50	18,00	9,75	13,75	61,00	B
33.	Pengadilan Tinggi Bandung	21,60	21,60	10,80	16,25	70,25	BB
34.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	21,60	21,60	9,75	17,50	70,45	BB
35.	Pengadilan Tinggi Banten	21,60	21,00	11,10	17,50	71,20	BB
36.	Pengadilan Tinggi Agama Banten	19,20	19,50	11,10	16,75	66,55	B
37.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	21,00	23,40	10,50	18,00	72,90	BB
38.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	21,00	22,20	10,80	16,25	70,25	BB
39.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	21,60	21,00	11,25	18,00	71,85	BB
40.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	21,60	23,40	12,30	17,50	74,80	BB
41.	Pengadilan Tinggi Surabaya	21,60	21,00	10,50	17,50	70,60	BB

No	Nama Satker	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Skor	Kategori
		30,00	30,00	15,00	25,00		
42.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	22,20	21,00	10,80	16,25	70,25	BB
43.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	21,90	21,90	11,25	15,00	70,05	BB
44.	Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	22,50	18,00	9,30	15,00	64,80	B
45.	Pengadilan Tinggi Denpasar	20,70	21,60	10,50	18,50	71,30	BB
46.	Pengadilan Tinggi Pontianak	21,60	21,90	11,55	19,50	74,55	BB
47.	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	23,70	24,30	11,55	20,00	79,55	BB
48.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	21,00	21,00	10,80	17,50	70,30	BB
49.	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur	21,00	21,00	11,55	17,50	71,05	BB
50.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	21,00	21,00	11,70	17,50	71,20	BB
51.	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	21,00	19,80	11,25	18,00	70,05	BB
52.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	23,10	24,00	12,15	18,75	78,00	BB
53.	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah	21,60	21,00	12,00	19,50	74,10	BB
54.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	21,00	21,30	10,50	18,25	71,05	BB
55.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	21,00	24,00	11,85	18,25	75,10	BB
56.	Pengadilan Tinggi Manado	21,00	21,90	11,70	18,00	72,60	BB
57.	Pengadilan Tinggi Agama Manado	22,50	22,50	10,50	17,50	73,00	BB
58.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	21,60	23,10	10,80	20,00	75,50	BB
59.	Pengadilan Tinggi Agama Palu	21,60	23,40	10,80	19,50	75,30	BB
60.	Pengadilan Tinggi Kendari	21,00	21,90	11,55	17,50	71,95	BB
61.	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	23,10	21,90	12,30	17,00	74,30	BB
62.	Pengadilan Tinggi	18,60	20,40	8,10	16,50	63,60	B

No	Nama Satker	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Skor	Kategori
		30,00	30,00	15,00	25,00		
	Makassar						
63.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	21,60	23,40	10,80	19,50	75,30	BB
64.	Pengadilan Tinggi TUN Makassar	21,00	19,80	8,10	17,50	66,40	B
65.	Pengadilan Tinggi Mataram	22,20	22,20	11,85	21,75	78,00	BB
66.	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	21,00	21,60	11,10	17,25	70,95	BB
67.	Pengadilan Tinggi Kupang	23,10	21,90	10,35	16,75	72,10	BB
68.	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	22,20	22,20	11,10	19,25	74,75	BB
69.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	22,20	21,60	10,65	16,00	70,45	BB
70.	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	21,00	23,10	11,10	15,50	70,70	BB
71.	Pengadilan Tinggi Ambon	19,80	21,00	11,10	18,50	70,40	BB
72.	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	21,00	23,40	9,30	17,25	70,95	BB
73.	Pengadilan Tinggi Jayapura	22,20	24,00	11,10	21,00	78,30	BB
74.	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	22,20	24,00	11,10	21,00	78,30	BB
	JUMLAH	1618,50	1641,60	823,80	1361,25	5445,15	
	RATA-RATA	21,87	22,18	11,13	18,40	73,58	BB

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 (pelaksanaan tahun 2022) terdapat 3 Satker (4,05%) memperoleh nilai A, 65 Satker (87,83%) memperoleh nilai BB, dan 6 Satker (8,10%) memperoleh nilai B.

Capaian nilai SAKIP tahun 2021 (pelaksanaan tahun 2022) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat penurunan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu dari 12 Satker menjadi 3 Satker (75%) dan masuk kategori B (baik) yaitu dari 9 Satker menjadi 6 Satker (33,33%), namun untuk kategori BB (sangat baik) terdapat peningkatan dari 53 Satker menjadi 65 Satker (22,64%). Peningkatan dan penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan kriteria penilaian, yang mana sebelumnya menggunakan pedoman evaluasi

akuntabilitas kinerja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 menjadi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022, dimana perubahan tersebut digunakan antara lain untuk mengakomodasi kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi.

Indikator kinerja ke-7: Reviu

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (39 LHP)	100% (39 LHP)	100%
2022	100% (25 LHP)	100% (25 LHP)	100%

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Reviu pada 39 satker, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 39 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Reviu pada wilayah I berjumlah 1 satker, pada wilayah II berjumlah 34 satker, pada wilayah III berjumlah 4 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Reviu pada 25 satker, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 25 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Reviu pada wilayah I berjumlah 1 satker, pada wilayah II berjumlah 22 satker, pada wilayah III berjumlah 2 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Indikator kinerja ke-8: *Liaison Officer (LO)*

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (1 LHP)	100% (1 LHP)	100%
2022	100% (3 LHP)	100% (3 LHP)	100%

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Pendampingan Pemeriksaan atas Keuangan 2021 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya (*Liaison Officer / LO BPK RI*) sejumlah 1 LHP, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 1 LHP, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 0 satker, pada wilayah II berjumlah 0 satker, pada wilayah III berjumlah 1 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Pendampingan Pemeriksaan atas Keuangan 2021 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya (*Liaison Officer / LO BPK RI*) sejumlah 3 LHP, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 3 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari

pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 0 satker, pada wilayah II berjumlah 3 satker, pada wilayah III berjumlah 0 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Indikator kinerja ke-9: Pemeriksaan Keuangan

Tahun/Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	100% (3 LHP)	100% (3 LHP)	100%
2022	100% (9 LHP)	100% (9 LHP)	100%

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Pemeriksaan Keuangan pada satker, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 3 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan pada wilayah I berjumlah 1 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 1 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Pada tahun 2022, Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan Pemeriksaan Keuangan pada 9 satker, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 9 satker, dengan capaian kinerja 100%. Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan pada wilayah I berjumlah 2 satker, pada wilayah II berjumlah 3 satker, pada wilayah III berjumlah 2 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 2 satker.

B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp15.432.634.000,- telah direalisasi sebesar Rp15.358.259.045,- atau 99,52%. Rincian realisasi anggaran kegiatan disajikan sebagai berikut.

Tabel XVII. Realisasi anggaran kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5 = 4/3 * 100%
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	-	-	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	-	-	-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	Rp5.379.806.000	Rp5.305.511.227	98,62%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	Rp861.831.000	Rp861.829.194	99,99%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	Rp149.681.000	Rp149.678.989	99,99%

	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	-	-	-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	Rp6.486.973.000	Rp6.486.949.589	99,99%
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Audit Kinerja	Rp2.427.566.000	Rp2.427.514.196	99,99%
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	Rp126.777.000	Rp126.775.850	99,99%

Rata-rata capaian kinerja sebesar 105,83% serta realisasi anggaran sebesar 99,87% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana pada Badan Pengawasan, yang secara keseluruhannya bernilai positif, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel XVIII. Efisiensi Anggaran Kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	% EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	-	100%	100%
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	-	100%	100%
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	98,62%	100%	1,38%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	99,99%	100%	0,01%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	99,99%	100%	0,01%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	99,99%	100%	0,01%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	99,99%	108%	8,01%
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	99,998%	100%	100%
	Pengadilan yang dilakukan Audit Barang dan Jasa	99,9%	120%	20,10%

Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	99,9%	125%	25,10%
Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	99,9%	122%	22,10%
Peningkatan Zona Integritas/SMAP	99,9%	130%	30,10%
Pemeriksaan Probity	99,99%	100%	0,01%
Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	-	-	-
Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	99,99%	100% (2 kegiatan)	0,01%
Jumlah Pegawai yang mengikuti assessment	99,99%	100% (34 orang)	0,01%
Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	99,99%	100% (1 kegiatan)	0,01%
Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	99,99%	100%	0,01%
JUMLAH	1.398,13%	1.905,00%	506,87%
RATA-RATA	99,87%	105,83%	28,16%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun (berbasis Renstra tahun 2020-2024). Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2022 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai 99,52% serta rerata capaian kinerja di angka 105,83% (di atas 100%). Dengan demikian, kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai baik.

B. Saran

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebih ditingkatkan di masa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

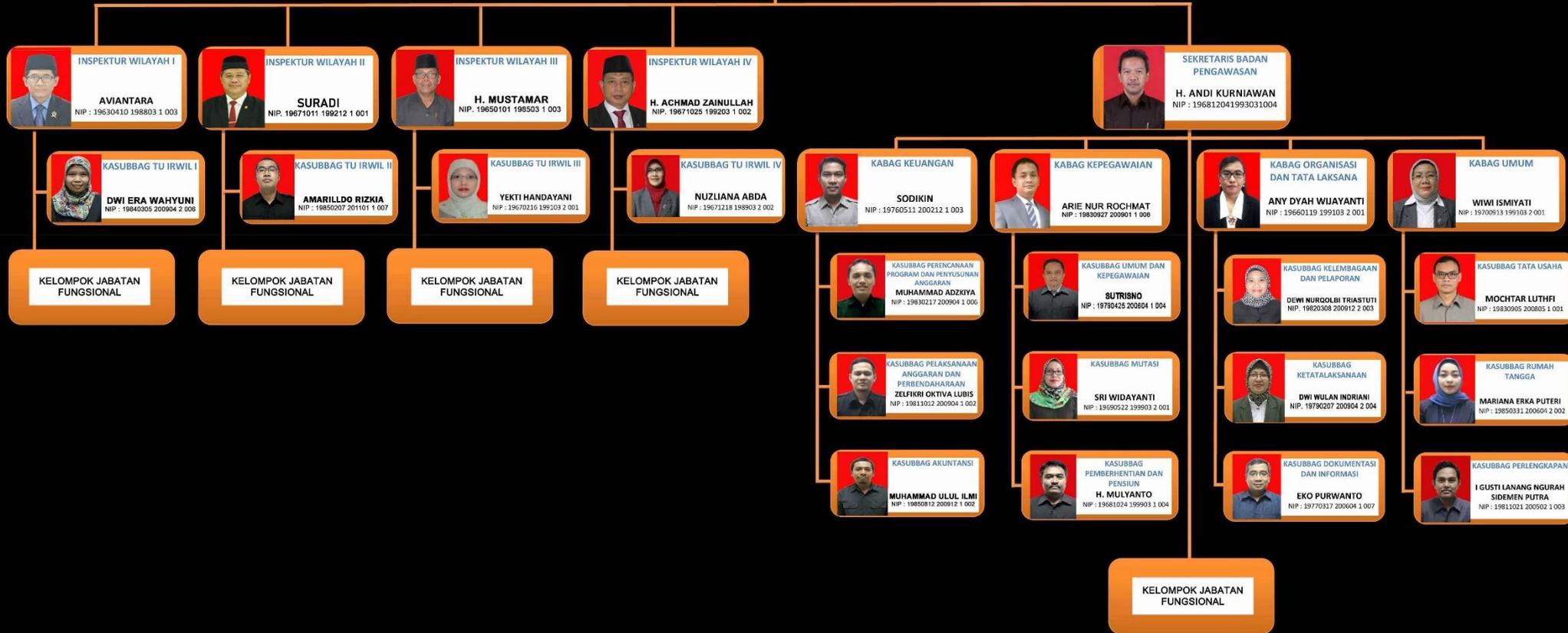
LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I

**KEPALA BADAN
PENGAWASAN**

SUGIYANTO
NIP. 19671124 199212 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 2 /BP/SK/I/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Meningkatkan : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2020 – 2024 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

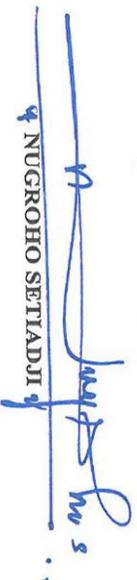
Handwritten signature/initials

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini adalah, merupakan acuan kinerja di lingkungan Badan Pengawasan. Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/20/M.PAN/1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 Januari 2020
Kepala Badan Pengawasan


4 NUGROHO SETIADI

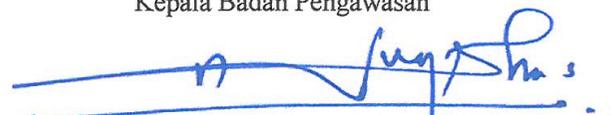
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : 2/BP/SK/I/2020
 TANGGAL : 8 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ditambah dengan jumlah sisa pengaduan tahun lalu (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase penanganan pengaduan tepat waktu;	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala
		Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;	Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasi dibagi dengan jumlah hukuman disiplin (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Bulanan website dari Ortala
		Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu.	Jumlah hasil pemeriksaan kasus tepat waktu dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan kasus (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
2.	Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.	Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan hasil pengawasan (x 100%)	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 8 Januari 2020
 Kepala Badan Pengawasan


 NUGROHO SETIADJI

MATRIKS RENSTRA 2020 – 2024

MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Visi : Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa

- Misi :
1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifikan pengawasan fungsional;
 2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
 3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.	100%	1) Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	170	Rp.6.617.592.000-
		100%		b. Persentase hukuman de plin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		70%		c. Persentase Laporan hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	0	189 70%	257 70%	292 70%	317 70%					

		50%	d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	-	50%	50%			-		-
		100%	e. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	80%	90%	100%			3. Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu		-

**SK TIM PENYUSUNAN LKjIP
BADAN PENGAWASAN TAHUN 2022**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 70 /BP/SK/XII/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusun Laporan tersebut;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang berkaitan dengan Penyusun LKJIP Badan Pengawasan Tahun 2022 dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **14** Desember 2022

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**



SUGIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
 Pengawasan Mahkamah Agung RI
 Nomor : **70** /BP/SK/XII/2022
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 Laporan Kinerja (LKjIP) Badan
 Pengawasan Mahkamah Agung RI
 Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sugiyanto, S.H.	3	4
1.	Sugiyanto, S.H.	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
2.	Aviantara, S.H.,M.Hum	Inspektur Wilayah I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Suradi, S.H.,S.Sos.,M.Hum	Inspektur Wilayah II	Wakil Penanggung Jawab
4.	Dr.H.Mustamar, S.H.,M.Hum	Inspektur Wilayah III	Wakil Penanggung Jawab
5.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.	Sekretaris Badan Pengawasan	Wakil Penanggung Jawab
6.	Dr.H.Achmad Zainullah, S.H.,M.H.	Inspektur Wilayah IV	Ketua
7.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Organisasi dan Tataaksana	Sekretaris
8.	Eko Purwanto, S.T., M.H.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
9.	Dwi Wulan Indriani, S.Psi.	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
10.	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., M.H.	Kasubbag Ketembagaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Zullvan Sugiantoro, S.T.	Pranata Komputer Muda	Anggota
12.	Muhammad Huzafah, S.Kom.	Pranata Komputer Pratama	Anggota
13.	Dewi Putri Novindari, S.Kom.	Penyusun Bahan Dokumentasi dan Publikasi	Anggota
14.	Mawardi, S.H.	Analisis Ketatalaksanaan	Anggota
15.	Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
16.	Ricky Pramoeodya Hermawan, A.Md.,Ak	Pengelola Tata Naskah	Anggota
17.	Aid Fauzan, S.H.	PPNPN	Anggota
18.	Bagas Andhika Sakti, S.T.	PPNPN	Anggota

Jakarta, ~~14~~ Desember 2022
**KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI**


SUGIYANTO

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%				75%	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%				100%	-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%				100%	Rp3.390.993.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	80%	-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%				80%	Rp 100.000.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%				100%	-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%				100%	Rp 1.886.896.000

administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%				100%	Rp 2.066.345.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%				100%	Rp 150.236.000
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%				100%	Rp 1.593.600.000
	Pemeriksaan Probitiy	100%		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung		100%	Rp 212.168.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%			004 Pelaksanaan MKH	100%	Rp 100.000.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%				100%	Rp 328.150.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%			75%	-	
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%			100%	-	
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%			100%	Rp6.705.720.000	
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan	80%	-

	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	100%			Inspektorat wil I, II, III, IV	80%	Rp72.080.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%				100%	-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	81 LHP				81 LHP	Rp3.578.345.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	73 LHP				73 LHP	Rp3.231.804.000
	Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	5 LHP				5 LHP	Rp284.136.000
	Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	8 LHP				8 LHP	Rp295.080.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	9 LHP				9 LHP	Rp317.268.000
	Peningkatan Zona Integritas	158 LHP				158 LHP	Rp6.650.474.000
	Pemeriksaan Probitiy	10 Kegiatan				10 Kegiatan	Rp212.168.000

	Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp743.276.000
	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp644.960.000
	Pegawai yang mengikuti assessment	20 Orang				20 Orang	Rp115.000.000
	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	2 Kegiatan				2 Kegiatan	Rp899.390.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim	20 LHP	1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	004 Pelaksanaan MKH	20 LHP	Rp100.000.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. Hasbi, M.H.
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

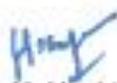
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

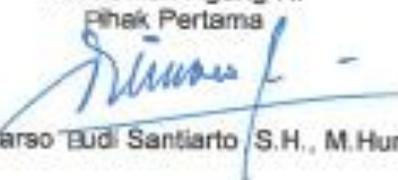
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2021

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Dr. H. Hasbi, M.H.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	3. Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	4. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp3.390.993.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	2. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 100.000.000
	3. Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp1.886.896.000
	2. Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp2.066.345.000
	3. Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 150.236.000
	4. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%	Rp1.593.600.000	
	5. Pemeriksaan Probitiy	100%	Rp 212.168.000	
	6. Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%	Rp 100.000.000	
	7. Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%	Rp 328.150.000	

Jumlah Anggaran : **Rp9.828.388.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2022**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	3. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	4. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp6.705.720.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	3. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	81 LHP		Rp3.578.345.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	73 LHP		Rp3.231.804.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	5 LHP		Rp 284.136.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	8 LHP		Rp 295.080.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	9 LHP		Rp 317.268.000
	6. Peningkatan Zona Integritas	158 LHP		Rp6.650.474.000
	7. Pemeriksaan Probity	10 Kegiatan	Rp 212.168.000	
	8. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan	Rp 743.276.000	

	9. Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan	lainnya	Rp 644.960.000
	10. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	20 Orang		Rp 115.000.000
	11. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	2 Kegiatan		Rp 899.390.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	20 LHP		Rp 100.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp23.849.701.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

H. Dwiarso Budi Santiarso / S.H., M.Hum.

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	80%	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 100.000.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%		Rp 100.000.000
	Pemeriksaan Probity	100%		Rp 212.168.000

Jumlah Anggaran : **Rp412.168.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2022**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Februari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<i>Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan anggaran serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan Badan Pengawasan</i>			Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	
1.) Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran secara akurat, transparan dan akuntabel	Jumlah dokumen Reviu Renstra secara lengkap dan akurat	1 Dokumen		
	Jumlah dokumen Rencana Kerja secara lengkap dan akurat	1 Dokumen		
	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan anggaran secara lengkap dan akurat	1 Dokumen		
	Jumlah dokumen Revisi Rencana Kerja secara lengkap dan akurat	5 Dokumen		
	Jumlah dokumen Program Kerja secara lengkap dan akurat	1 Dokumen		
2.) Terlaksananya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah dokumen pertanggungjawaban belanja secara lengkap dan tepat waktu	85 Dokumen		
	Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara secara lengkap dan tepat waktu	12 Dokumen		
	Jumlah laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu	8 Dokumen		
3.) Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan verifikasi secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi (SMART DJA dan Monev BAPPENAS) secara lengkap dan tepat waktu	24 Dokumen		
	Jumlah laporan PIPK secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		

<i>Terlaksananya penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan</i>				
1.) Terlaksananya penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah laporan tahunan secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		
	Jumlah laporan LKjIP secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		
	Jumlah laporan evaluasi organisasi secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		
2.) Terlaksananya penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah laporan evaluasi pedoman pemeriksaan secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		
	Jumlah laporan penyusunan dan evaluasi SOP secara lengkap dan tepat waktu	1 Dokumen		
	Jumlah pengelolaan LHP tepat waktu	12 Dokumen		
3.) Terlaksananya urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi secara lengkap dan tepat waktu	Persentase produk peraturan dan kegiatan badan pengawasan yang terpublikasi dan terdokumentasi dengan tepat waktu	100%		
	Persentase layanan data dan informasi internal maupun eksternal secara cepat dan lengkap	100%		
	Persentase sistem informasi yang berfungsi secara optimal	80%		
	Persentase sistem pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan	90%		

<i>Terlaksananya urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan</i>				
1.) Terlaksananya urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara tertib dan tepat waktu	100%		
	Persentase laporan pengelolaan arsip tepat waktu	100%		
2.) Terlaksananya urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan	Persentase layanan kualitas kebersihan gedung dan ruangan perkantoran secara tertib	100%		
	Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran secara tertib	70%		
	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara tertib	70%		
	Persentase penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan jamuan rapat, ruang pemeriksaan, dan pelantikan secara tertib	100%		

3.) Terlaksananya penyiapan bahan analisis kebutuhan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan	Jumlah laporan penyiapan bahan analisis kebutuhan secara lengkap dan akurat	1 Dokumen		
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan secara lengkap	2 Laporan		
	Jumlah laporan distribusi barang persediaan dan BMN sesuai dengan ketentuan	12 Laporan		
	Jumlah laporan inventarisasi dan penghapusan perlengkapan sesuai ketentuan	1 Laporan		
	Jumlah rekonsiliasi neraca internal secara tepat waktu dan akurat	12 Dokumen		
	Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sesuai ketentuan	1 Laporan		

<i>Terlaksananya urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan</i>				
1.) Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta SKP, administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai sesuai ketentuan	Tersedianya hasil Analisis Beban Kerja jabatan pelaksana di lingkungan Badan pengawas secara lengkap dan optimal;	100%		
	Persentase pegawai Badan Pengawas yang telah memenuhi jam pelatihan minimal 20 JP sesuai ketentuan;	40%		
	Presentase jumlah pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara lengkap dan sesuai ketentuan;	100%		
	Presentase layanan administrasi jabatan fungsional (Dupak) secara tepat waktu;	90%		
	Tingkat kepuasan layanan kepegawaian lainnya;	3 (Skala 4)		
	Presentase pemutakhiran data kepegawaian secara lengkap	100%		

2.) Terlaksananya penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan mutasi sesuai ketentuan	Presentase layanan mutasi jabatan pegawai yang sesuai ketentuan;	50%		
	Jumlah layanan kenaikan pangkat secara tepat waktu;	10 Dokumen		
	Jumlah layanan Kenaikan Gaji Berkala secara tepat waktu;	15 Dokumen		
	Jumlah Assesment Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial dan Aparatur sesuai ketentuan	30 Pegawai		
3.) Terlaksananya penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai ketentuan	Jumlah layanan pensiun pegawai secara tepat waktu;	4 Dokumen		
	Presentase laporan disiplin pegawai secara lengkap	100%		

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH I
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah I
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pihak Pertama


Aviantara, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase Penanganan Pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp746.710.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp455.477.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp627.437.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 39.020.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%	Rp 35.564.000	

Jumlah Anggaran : **Rp1.904.208.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH I
TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum

Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Pihak Kedua

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah I
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Aviantara, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.812.054.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 688.179.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 832.828.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 69.460.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP	Rp 75.136.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	2 LHP	Rp 70.592.000	
	Peningkatan Zona Integritas	43 LHP	Rp1.593.600.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	Rp 395.710.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan	Rp 364.210.000	

Jumlah Anggaran : **Rp5.973.849.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH II
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.H
Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Sugiyanto, S.H

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.212.638.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp 511.318.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp 469.734.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 21.020.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%		Rp 200.000.000
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%		Rp1.593.600.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.008.310.000** ,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH II
TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.H
Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

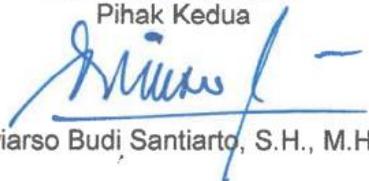
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Sugiyanto, S.H

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-	
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-	
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-	
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.914.867.000	
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000	
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-	
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	40 LHP			Rp1.264.500.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP			Rp 726.600.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP			Rp 30.436.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 41.808.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	4 LHP		Rp 146.196.000	
	Peningkatan Zona Integritas	56 LHP		Rp2.206.874.000	
	Pemeriksaan Probitas	10 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 212.168.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan		Rp 535.180.000	

Jumlah Anggaran : **Rp7.150.709.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH III
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

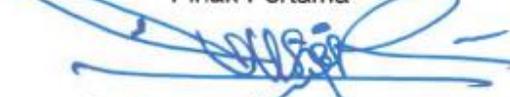
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.789.838.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 100.000.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	16 LHP		Rp 889.919.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 928.189.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 40.452.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP	Rp 76.716.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	1 LHP	Rp 43.468.000	
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 274.890.000
	Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp 222.708.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.366.180.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH III
TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Dr. H. Mustamar, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.732.974.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	16 LHP		Rp 831.580.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 960.141.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 LHP		Rp 90.052.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP	Rp 79.788.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	2 LHP	Rp 36.562.000	
	Peningkatan Zona Integritas	32 LHP	Rp1.500.000.000	
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 303.573.000
	Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp 249.250.000

Jumlah Anggaran : **Rp5.856.000.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH IV
TAHUN 2021**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.
Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

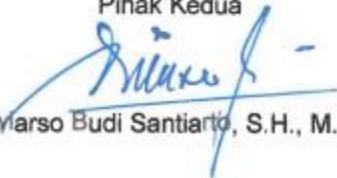
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2021, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah IV
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2021 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp 1.242.306.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 100.000.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	10 LHP		Rp 773.758.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	13 LHP		Rp 921.159.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 49.744.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP	Rp 91.000.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	1 LHP	Rp 49.124.000	
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 351.278.000

Jumlah Anggaran : **Rp3.578.369.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH IV
TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

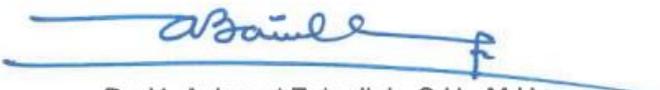
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah IV
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.245.825.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	10 LHP		Rp 794.086.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	13 LHP		Rp 712.235.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 94.188.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP	Rp 98.348.000	
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	1 LHP	Rp 63.918.000	
	Peningkatan Zona Integritas	27 LHP	Rp1.350.000.000	
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 439.703.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.870.383.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan